



ISSN: 2089-0532, e-ISSN: 2548-6152

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL (STUDI KASUS KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT)

Eka Christanti¹

**¹Universitas Tribhuwana Tunggadewi
ekachristanti2@gmail.com**

ABSTRACT

The purpose of this paper is to discuss the Implementation of Tourism Policy Based on Local Wisdom in Tanjung Puting, Pangkalan Bun, West Kotawaringin. This research method uses descriptive method with a qualitative approach. The data source used is Secondary data. The results of this study indicate that the Implementation of this Policy contributes well to the government, society, environment, and the economy. Scientific contributions in this study are to identify the Implementation of Tourism Policy Based on Local Wisdom.

Keywords: Policy Implementation, Local Wisdom, Tourism

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk membahas Implementasi Kebijakan Pariwisata Berdasarkan Kearifan Lokal di Tanjung Puting Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data Sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan ini berkontribusi dengan baik bagi pemerintah, masyarakat dan lingkungan maupun perekonomian. Kontribusi keilmuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Implementasi Kebijakan Pariwisata Berdasarkan Kearifan Lokal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kearifan Lokal, Pariwisata

PENDAHULUAN

Luasnya Indonesia dan banyaknya suku, budaya maupun adat istiadat bagi negara Indonesia pun sangat beragam dan memiliki ciri khas tersendiri, oleh karena itu pengembangan dan pengenalan suatu pariwisata dari daerahnya sendiri sangat diperlukan. Menurut Koen Meyers (2009) Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh semntara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan lainnya. Pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks mampu menghidupkan sektor-sektor lain meliputi industri-industri seperti kerajinan tangan, cendera mata, penginapan, dan transportasi (Diana, 2017: 85).

Pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat memang tidak perlu diragukan lagi. Setiap tahunnya puluhan ribu wisatawan datang ke wilayah ini. Namun hal itu belumlah cukup, promosi pariwisata tetap wajib dilakukan. Dinas

Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah siap mendukung program pariwisata di Kobar. Karena selain tempat wisata Taman Nasional Tanjung Puting yang sudah dikenal sampai ke mancanegara, ada even besar yang bisa digelar di Kotawaringin Barat.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meneguhkan pariwisata sebagai leading sektor diteguhkan dalam bentuk perintah agar segala pembangunan infrastruktur mengarah kepada pengembangan dan kemajuan pariwisata. Selain itu dari sisi anggaran pun terus disesuaikan dan akan ditingkatkan setiap tahunnya.

Dari sisi aksesibilitas menuju Kota Waringin Barat relatif mudah karena dapat ditempuh dengan jalur udara, darat dan laut. Setiap hari maskapai penerbangan Nam Air, dan Trigana Air terbang dari Jakarta ke Pangkalan Bun PP dan Wings Air dari Semarang ke Pangkalan Bun.

Dari penelitian terdahulu, perbedaannya adalah peneliti saat ini lebih fokus kepada penelitian berbasis Kearifan Lokal. Sedangkan penelitian lain masih belum fokus kepada penelitian berbasis Kearifan Lokal.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| Peneliti/Tahun/Universitas | Judul | Permasalahan | Hasil |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sandra Woro Aryani, Sunarti, Ari Darmawan. 2016. Muhammadiyah Mataram | Analisis Dampak Pembangunan Pariwisata Pada Aspek Ekonomi Dan Sosial Budaya Masyarakat | Pelaksanaan pembangunan industri pariwisata didalamnya meliputi pengembangan obyek dan daya tarik wisata, sarana prasarana, pemasaran dan promosi pariwisata, serta pengembangan sumber daya manusia | Pembangunan pariwisata yang dilakukan berdampak pada aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat, dampak tersebut berupa dampak positif dan juga dampak negatif |
| Nawangsih. 2017. STIE Widya Gama Lumajang | Nilai Kearifan Lokal Kawasan Wisata Menggunakan Pendekatan green Marketing Berbasis Masyarakat | bentuk nilai kearifan lokal, pendekatan green marketing, | Kegiatan pemetaan (mapping) kawasan wisata beberapa lokasi andalan yang memiliki potensi |

| | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | unggulan untuk dijadikan tujuan wisata sekaligus sebagai peluang usaha produktif untuk menambah pendapatan dari masyarakat setempat. |
| Deddy Prasetya Maha Rani. 2014. Airlangga | PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang) | pembangunan infrastruktur dan masih melakukan kegiatankegiatan promosi | Dampak yang dialami Masyarakat Kabupaten Sumenep saat ini belum merasakan hasil yang besar dari pengembangan sektor pariwisata, keterbatasan pemerintah daerah dalam pengalokasian dana yang diterima dikarenakan factor geografis Sumenep terletak diujung pulau Madura sehingga dana yang masuk untuk pemerintah daerah juga tidak seimbang dengan pengembangannya maka butuh waktu bila ingin adanya peningkatan di Sumenep serta adanya suatu batasanbatasan budaya ataupun adat-istiadat. |

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan

Prof. H. Tachjan Guru Besar Ilmu Administrasi UNPAD (2006) adalah suatu proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui. Sedangkan Mulyadi (2015:12) berpendapat bahwa implementasi

mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahanperubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi

setelah program dilaksanakan.

Menurut Agostino (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Pembangunan Pariwisata

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah gejala yang kompleks dalam masyarakat, di dalamnya terdapat hotel, obyek wisata, souvenir, pramuwisata, angkutan wisata, biro perjalanan wisata, rumah makan, dan banyak lainnya, Suwena (2010:15).

Pengembangan Destinasi Wisata Kawasan Kalimantan Tengah Sumber Daya Manusia Sertifikasi profesi Sumber Daya Manusia industri pariwisata (*eco-tour guide, river cruise guide, and other*) Pelatihan Sumber Daya Manusia untuk peningkatan kapasitas SDM (*tour operator, boat chef, and other*) masyarakat Peningkatan kapasitas masyarakat (pengelolaan homestay desa wisata) Peningkatan gerakan sadar wisata di destinasi Pengembangan tata kelola

destinasi pariwisata Industri Pembinaan dan pengawasan operator pelaku usaha pariwisata Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata Pengawasan paket wisata.

Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri Wibowo (2015:17). Rahmi (2016: 82) daya tarik wisata budaya ialah daya tarik wisata yang pengembangannya berdasarkan pada hasil karya dan hasil cipta manusia, baik itu berupa peninggalan budaya maupun nilai budaya yang masih hidup dalam kehidupan suatu masyarakat. Contoh daya tarik wisata budaya ialah upacara atau ritual, adat-istiadat, seni pertunjukan dan lain sebagainya. Karakteristik wisata budaya dari suatu daerah memiliki peran yang sangat menentukan dalam menyerap dampak dari destinasi pariwisata suatu daerah. Wisata budaya yang memiliki karakteristik yang lain daripada yang lain merupakan nilai unggul yang dapat dijadikan kekuatan dalam menarik wisatawan lebih banyak lagi.

Selanjutnya Istiawati (2016:5) berpandangan bahwa kearifan lokal merupakan cara orang bersikap dan bertindak dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan fisik dan budaya. Suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai dengan yang profan (bagian keseharian dari hidup dan sifatnya biasa-biasa saja). Kearifan lokal atau *local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Tabel 2. Unsur 3A

| Atraksi | Amenitas | Aksesibilitas |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyiapkan sebanyak 32 event unggulan yang akan digelar sepanjang tahun. | 1. Amenitas sudah cukup bagus ada hotel berbintang dari lokal hingga internasional chain. 2. Di pusat Kota Kotawaringin Barat ada hotel bintang empat seperti Swissbel Hotel dan Grand Ketjubung. | 1. Aksesibilitas menuju Kota Waringin Barat relatif mudah karena dapat ditempuh dengan jalur udara, darat dan laut. 2. Setiap hari maskapai penerbangan Nam Air, Trigana Wings Air dan Garuda Indonesia |

Data Statistik Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat, jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara (WISMAN) dan Wisatawan Nusantara (WISNU) memperlihatkan tingkat kunjungan yang terus naik tiap tahunnya. dari 2 (dua) destinasi wisata

unggulan di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu Objek Wisata Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) dan Objek Wisata Pantai Bugam Raya (pantai kubu, pantai umbang, pantai bugam raya, dan sebagainya).

Tabel 3. Data Kunjungan Objek Wisata Taman Nasional Tanjung Putting

| DATA KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA DAN NUSANTARA DI OBJEK WISATA TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| TAHUN | WISMAN | WISNU |
| 2011 | 5.444 orang | 3.102 orang |
| 2012 | 7.727 orang | 4.559 orang |
| 2013 | 8.439 orang | 4.916 orang |
| 2014 | 10.986 orang | 5.703 orang |
| 2015 | 9.767 orang | 2.797 orang |
| 2016 | 8.942 orang | 6.164 orang |
| 2017 | 14.933 orang | 9.760 orang |

Sumber data: Dinas Pariwisata Kotawaringin Barat

Tabel 4. Data Kunjungan Objek Wisata Pantai Bugam Raya

| DATA KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA DI OBJEK WISATA PANTAI BUGAM RAYA | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| TAHUN | WISNU |
| 2011 | 57.506 orang |
| 2012 | 53.669 orang |
| 2013 | 48.366 orang |
| 2014 | 57.031 orang |
| 2015 | 50.717 orang |

| | |
|------|--------------|
| 2016 | 72.754 orang |
| 2017 | 78.578 orang |

Sumber Data: Dinas Pariwisata Kotawaringin Barat

Implementasi Kebijakan Pariwisata Berdasarkan Kearifan Lokal

Implementasi kebijakan Berdasarkan teori Edward III ini, kesuksesan implementasi Kebijakan ditentukan oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

- Komunikasi** : Menurut Model Edward III, komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.
- Sumber Daya** : Menurut Model Edward III, resource berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Adanya aktor implementasi kebijakan paling penting dalam keberhasilan sebuah kebijakan.
- Disposisi** : Menurut Model Edward III, disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
- Birokrasi** : Menurut Model Edward III, struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana supaya tidak terjadi *bureaucratic fragmentation*

karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi lebih jauh dari efektif.

Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Kotawaringin Barat ditinjau dari beberapa segi, yaitu partisipasi masyarakat meliputi:

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan

Manusia modern seharusnya menyadari bahwa kearifan lokal itu bukanlah merupakan suatu yang ditemukan dan dikembangkan oleh para nenek moyang secara instan. Akan tetapi, kearifan lokal ini dikembangkan dalam waktu lama dan selaras dengan pelestarian lingkungan (Noor, 2014).

Dalam hal pengembangan pariwisata ini pemerintah berperan aktif untuk perizinan segala bentuk hal pariwisata dan persetujuan diadakannya penampilan dari khas dari Adat Kalimantan Tengah itu sendiri. Serta masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dan banyak penampilan kreadi dari tradisi, baik dari tarian ataupun aksesoris yang mereka buat dengan olahan tangan sendiri yang dibuat dari alam.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian

Darmawan (2010: 157) mengatakan bahwa tokoh masyarakat, paling tidak dapat menjalankan fungsi pemeliharaan budaya, fungsi integrasi, dan fungsi pencapaian tujuan. Sistem kebudayaan yang diterapkan secara turun temurun ini biasanya dilakukan oleh tokoh-tokoh yang terpilih. Tidak sembarang orang

dapat melakukan acara-acara ritual, itulah yang dilakukan oleh masyarakat yang berpartisipasi dalam pelestarian ini.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kearifan Lokal

Ketua adat di Kalimantan Tengah akan menyambut para tamu yang akan berkunjung di daerah mereka, baik dengan tarian atau doa dengan puji-pujian khas Kalimantan, ada pula penyambutan dengan acara minum toa atau minuman khas dari daerah mereka untuk penyambutan terhormat.

KESIMPULAN

Dalam implementasi kebijakan-kebijakan tersebut dikatakan sudah berhasil, dilihat dari indikator implementasi kebijakan dari Model Edward III, yaitu komunikasi, Sumber Daya Manusia, disposisi, dan birokrasi. Implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat. Banyaknya objek Wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan juga adanya Budaya Lokal Kalimantan Tengah Pangkalan Bun alangkah lebih baik jika berbagai kegiatan yang telah disusun bisa dipublikasikan dan mengundang wisatawan untuk hadir ke Kotawaringin Barat, tidak hanya wisatawan lokal, namun juga wisatawan nasional bahkan internasional. Kearifan lokal atau budaya yang ada hendaknya memiliki nilai lebih tanpa harus mengurangi atau menambah nilai dari budaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik", Cetak Pertama. Bumi Aksara. Jakarta
- Darmawan. 2010. Implementasi Kebijakan Publik. Industri Perjalanan Wisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Denpasar Bali
- Diana Putri, dkk. 2017. Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Desa Peliatan, Ubud. Program Studi S1 Industri Perjalanan Wisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Denpasar Bali
- Edward III, George C. 1984. Public Policy Implementing. Jai Press Inc, London-England.
- Mulyadi. 2015. Implementasi Kebijakan, Edisi 5. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Siti Atika Rahmi. 2016. Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Kearifan Lokal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
- Suwarna. 2010. Kebijakan Pariwisata. Industri Perjalanan Wisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Denpasar Bali
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Yerik Afrianto Singgalen, Pamerdi Giri Wiloso, Gatot Sasongko. Evaluation of the Implementation of Tourism Policy. Vol. 21 (1), May 2017, 76-98